

MAKSIMALKAN PELAYANAN, PEMKOT BERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN LAKUKAN AUDIT KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KENDARI



Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, entry meeting atau rapat pendahuluan audit kinerja PDAM Tirta Anoa Kendari, di ruang rapat sekda, Kamis. (ANTARA/Suparman)

sultra.antaranews.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar entry meeting atau rapat pendahuluan audit kinerja PDAM Tirta Anoa Kendari, di ruang rapat sekda, Kamis. "harapan kita dengan dilakukannya audit kinerja ini, maka ke depan pelayanan terhadap air bersih di wilayah Kota Kendari bisa lebih maksimal," kata pj Wali kota Kendari, Asmawa Tosepu. Pj Wali Kota Kendari, kemudian melaporkan mengenai kondisi PDAM, kelembagaan PDAM, tata kelola dan kinerja PDAM kepada tim audit. "Kami laporkan saja di awal, saat ini sedang berproses, pembahasan tentang Perumda Tirta Anoa. Kita ingin mengubah dari PDAM menjadi Perumda.

Proses di DPRD sudah sampai pada tahapan pandangan fraksi sudah, pembahasan, setelah ini mungkin penetapan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa ditetapkan Perumdanya dan dari sisi kelembagaan kita bisa mengisi," kata Asmawa Tosepu. Asmawa Tosepu berharap dengan dilakukannya transformasi dari PDAM ke Perumda dan dikelola dengan profesional maka tata kelola akan maksimal. "Mudah-mudahan karena harapannya kita dikelola secara profesional, kelembagaannya juga dapat betul-betul mengarah ke sisi profesional, kemudian harapan kita akan semakin baik," tambahnya.

Ketua Tim Audit Kinerja PDAM Tirta Anoa Kendari, Reski, menjelaskan audit pendahuluan yang akan berlangsung selama 15 hari ini harapannya dapat memberikan gambaran dan akan dilanjutkan pada pemeriksaan terinci. Disebutkan, ada tiga alasan BPK melaksanakan pemeriksaan audit kinerja> Pertama, karena penyediaan 100 persen akses air minum layak dan aman sudah menjadi target di RPJMN 2020-2024. "Sementara saat ini masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggara penyediaan air minum serta menurutnya, masih kurangnya kapasitas dan komitmen pemda sebagai penyelenggara," katanya.

Alasan kedua kedua katanya, PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah yang bergerak sebagai penyedia air minum untuk masyarakat sampai hari ini belum menunjukkan kinerja optimal. "Dimana secara nasional sampai hari ini baru ada 2.225 PDAM atau 68 persen dari seluruh Indonesia yang kinerjanya sehat, sedangkan sisanya berkinerja kurang sehat dan sakit," ucap Reski. Menurut dia, berdasarkan laporan atau data yang diperoleh BPK, hingga saat ini PDAM Tirta Anoa ini masih berkinerja sakit. Usai dilakukannya audit ini, Ketua Tim Audit mengharapkan penyediaan akses air minum kedepannya bisa menjadi lebih baik, dari sisi tata kelola, kelembagaan, kinerja PDAM. Dalam entry meeting ini diikuti oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala, Asisten II Setda Kota Kendari, Inspektur Kota Kendari, Kepala Dinas PUPR Kota Kendari dan Direktur PDAM Tirta Anoa Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/432349/maksimalkan-pelayanan-pemkot-bersama-bpk-lakukan-audit-kinerja-pdam-kendari>, Maksimalkan Pelayanan, Pemkot Bersama BPK Lakukan Audit kinerja PDAM Kendari, Kamis 3 November 2022
2. <https://www.kendarikota.go.id/berita/pemkot-kendari-bersama-bpk-sultra-lakukan-audit-kinerja-pdam-tirta-anoa-kendari/>, Pemkot Kendari Bersama BPK Sultra Lakukan Audit Kinerja PDAM Tirta Anoa Kendari, Kamis 3 November 2022

Catatan:

1. Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 ayat 1: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pasal 4 ayat 3: Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.